

LAKIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-prektek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Semoga laporan akuntabilitas ini betul-betul bermanfaat tidak saja bagi perkembangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat, juga bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kedepan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karimun.

Tg. Balai Karimun, Maret 2020

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671003 199203 1 010



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
1. Maksud	2
2. Tujuan	2
C. Data Organisasi	3
1. Tugas Pokok	4
2. Fungsi	4
3. Sumber Daya	5
4. Struktur Organisasi	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Gambaran Umum Rencana Strategis 2016 – 2021	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD	10
3. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	12
4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra	13
5. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra	15
6. Kebijakan Program	19
B. Rencana Kerja OPD 2019	24
C. Perjanjian Kinerja 2019	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pengukuran Capaian Kinerja	28
B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2019 Menurut Sasaran	30



C. Realisasi Anggaran	53
D. Capaian Kinerja RPJMD	54
E. Capaian Kinerja Renstra	56
 BAB IV PENUTUP	 59

- Lampiran :
1. Rancana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
 3. Rencana Aksi Tahun 2019

Realisasi Rencana Aksi Tahun 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Peraturan Pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan serangkaian tujuan dan Sasaran Strategis yang akan diwujudkan melalui Program dan Kegiatan dan sangat berpengaruh sekiranya dilakukan pertanggungjawaban oleh setiap lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan kewajibannya. Hal demikian menjadi bagian yang tidak dapat dihindari untuk mencapai keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 merupakan suatu perwujudan pentingnya memberikan pertanggungjawaban suatu lembaga pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan kepada publik



atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dalam kurun waktu tahun bersangkutan.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam menyelenggarakan 1 (satu) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan dan 1 (satu) Urusan Pilihan Perindustrian yang telah dibebankan kepadanya, juga tidak dapat menghindar untuk menyampaikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selaku Pihak Pertama dengan Bupati Karimun yang selanjutnya menjadi Pihak Kedua pada Tahun Anggaran 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dibuat dengan maksud menjadi dokumen pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selama tahun bersangkutan, yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Kabupaten Karimun sebagai Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang (1) Tenaga kerja dan (2) Perindustrian.

2. Tujuan

LAKIP Tahun 2019 dibuat dengan tujuan :

- a) Untuk menjelaskan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun kepada publik melalui Bupati Karimun



dalam menyelenggarakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan prioritas program dan kegiatan.

- b) Untuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja menurut sasaran dan tujuan yang telah diukur dengan dukungan pendanaan indikatif Dana APBD dan APBD-P Kabupaten Karimun.
- c) Untuk menerangkan pengelolaan keuangan daerah yang telah disediakan untuk Kepentingan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

C. Data Organisasi

Dalam kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun memiliki kewenangan untuk mengelola belanja daerah terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai lembaga Pemerintah di Daerah, keberadaan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun bertumpu pada kekuatan yang dimiliki Organisasi Tugas Fungsi, data Pegawai dan data Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dinas Daerah, untuk itu akan dijelaskan kedalam 4 Aspek yaitu : (1) Tugas Pokok (2) Fungsi (3) Data Pegawai (4) Struktur Organisasi.

1. Tugas pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- 1) Merumuskan perencanaan, kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 2) Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 3) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- 4) Melaksanakan kegiatan lain di Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian yang ditugaskan oleh Bupati.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- 2) Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.



3. Sumber Daya

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sampai akhir tahun 2019 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 54 Pegawai yang mana 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 (dua puluh enam) orang pegawai kontrak/PTT, dengan rincian pegawai sebagai berikut :

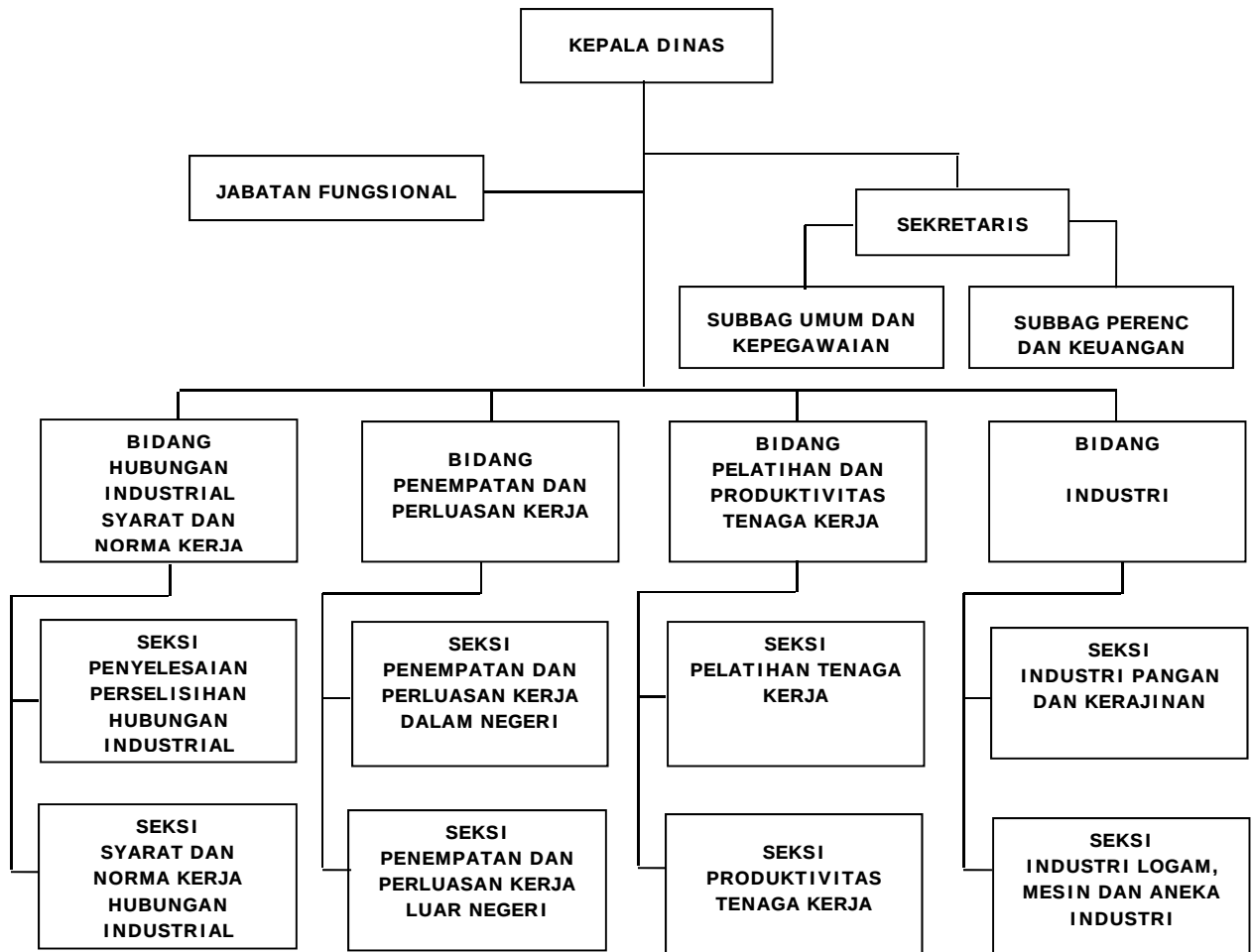
No	Pendidikan	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	PTT	Jumlah
1	S-3	-	-	-	-	-	-
2	S-2	3	1	-	-	-	4
3	S-1/DIV	2	13	-	-	9	24
4	D III	-	1	-	-	-	1
5	SMA	-	1	7	-	17	25
6	SMP	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	16	7		26	54

Dengan Susunan kedudukan pegawai sebagai berikut :

No	Jabatan	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	PTT	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris	1					1
3	Kepala Bidang	2	2				4
4	Kepala Seksi	1	7				8
5	Kepala Subbagian		2				2
6	Pelaksana		5	7		26	38
7	Fungsional						
	Jumlah	5	16	7		26	54



4. Struktur Organisasi



D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Lakip Terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Data Organisasi
- D. Sistematika Penyajian



BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Gambaran Umum Rencana Strategis 2016-2021
- B. Rencana Kinerja OPD Tahun 2019
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Capaian Kinerja
- B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2019 Menurut Sasaran
- C. Realisasi Anggaran
- D. Capaian Kinerja RPJMD
- E. Capaian Kinerja Renstra

BAB IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Rencana Strategis 2016-2021

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun memiliki rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu periode tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan, sasaran dan program yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2019 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 sebagai Rencana Kerja tahunan.

1. Visi dan Misi

- Visi

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta atas kesepakatan yang telah disusun dan mencermati kondisi, potensi dan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dewasa ini, maka Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang diselaraskan pada Visi Kabupaten Karimun Yakni :

**"Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan
Iman dan Taqwa"**



Pernyataan visi dimaksud adalah merupakan harapan dimasa depan tentang peran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia), sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun harus dapat mendinamisasikan dan menstimulasikan masyarakat untuk memanfaatkan setiap kesempatan kerja, mampu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak sehingga pada akhirnya ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan sosial yang berkualitas, mandiri dan bermartabat dapat secepatnya terwujud.

- **Misi**

Misi merupakan alasan keberadaan untuk apa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ada dilingkungan masyarakat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang diselaraskan dengan misi Kabupaten Karimun yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi tersebut.

Lebih jauh pernyataan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi organisasi tersebut. Misi Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kabupaten Karimun yang diselaraskan pada misi Kabupaten Karimun terdapat pada misi ke-4 dan ke-7 yaitu :

Misi ke-4 Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah (Terdepan dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan).

Uraian Misi ke-4 Yakni :

“Sumber daya manusia yang sehat, cerdas” adalah sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat, serta memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu, dua sektor utama yang paling berperan guna membangunnya adalah sektor kesehatan dan pendidikan. Kompetitif” dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan angkatan kerja pendatang, khususnya pada posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan sedang hingga tinggi. Dengan semakin terbukanya Kabupaten Karimun, ditambah lagi dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, maka membangun daya saing angkatan kerja lokal menjadi semakin mutlak untuk dikedepankan. Menjawab kebutuhan daerah” dimaksudkan sebagai standar kualifikasi angkatan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari sektor-sektor yang berkembang dan akan dikembangkan di Kabupaten Karimun. Diantara sektor-sektor tersebut, penekanan khusus perlu diberikan pada kebutuhan dari sektor industri manufaktur, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan. Termasuk dari “menjawab kebutuhan daerah” adalah berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri baik pada sektor industri pengolahan, perikanan, perkebunan, maupun pertanian tanaman pangan.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD

- Berdasarkan misi yang ditetapkan tersebut, maka tujuan, sasaran dan Indikator sasaran pembangunan Kabupaten Karimun Dinas Tenaga Kerja



dan Perindustrian untuk lima tahun ke depan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal

Tabel 2.2
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Jangka RPJMD
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact)	Kondisi awal	Target					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 4 Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah								
Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Indeks Pembangunan Manusia	69,84					72,80	72,80
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,94	60,19	60,45	60,71	60,98	61,22	61,22
	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,3	35	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9



3. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Karimun lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Misi 4. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah								
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dengan dukungan program pelatihan ketrampilan sesuai dengan karakteristik daerah	Membangun dan mengembangkan Balai Latihan kerja (BLK) yang melayani pelatihan keterampilan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan keutuhan penerima kerja yang dilengkapi dengan tenaga pendidik yang kompeten, perlengkapan yang memadai			X	X	X	X
		Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat diberbagai bidang	X	X	X	X	X	X
		Menyiapkan kualitas tenaga kerja lokal yang memenuhi standar kompetensi global	X	X	X	X	X	X

4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Penetapan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah	Mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja
			Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja



Tabel 2.5
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact)	Kondisi awal	Target					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 4 Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah								
RPJMD								
Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Indeks Pembangunan Manusia	69,84					72,80	72,80
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,94	60,19	60,45	60,71	60,98	61,22	61,22
	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,3	35	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
RENSTRA								
Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Indeks Pembangunan Manusia	69,84					72,80	72,80
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,94	60,19	60,45	60,71	60,98	61,22	61,22
	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,3	35	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
Mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,23	6,66	6,15	5,66	5,17	4,70	4,70

Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	Na	4	8	11	13	15	15
Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang bersertifikasi kompetensi	Na	14,3%	14,8	15,4	15,9	16,2	16,2
Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar PPHI	Na	25%	27	29	30	32	32
	Persentase Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Na	34,3%	34,7	35	35,4	35,7	35,7

5. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Misi 4	Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah							
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dengan dukungan program pelatihan ketrampilan sesuai dengan karakteristik daerah	Membangun dan mengembangkan Balai Latihan kerja (BLK) yang melayani pelatihan keterampilan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan keutuhan penerima kerja yang dilengkapi dengan tenaga pendidik yang kompeten, perlengkapan yang memadai			X	X	X	X
		Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat diberbagai bidang	X	X	X	X	X	X
		Menyiapkan kualitas tenaga kerja lokal yang memenuhi standar kompetensi global	X	X	X	X	X	X
Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja di Berbagai Lapisan Masyarakat.	Mendayagunakan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja terdidik,	X	X	X	X	X	X



		penganggur dan setengah penganggur						
	Mendorong Pelaku Industri Kecil dan Menengah atau Usaha Mikro untuk Meningkatkan Mutu dan Standar Produk Menjadi Produk Yang Terstandar Dan Tersertifikasi	Membangun dan menyediakan Sentra IKM serta menyediakan Informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat Sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan	X	X	X	X	X	X
	Penciptaan Produk Turunan Baru dan Unggulan Bagi IKM	Melakukan arahan, binaan, dan membuka informasi pengolahan produk perikanan	X	X	X	X	X	X
	Peningkatan Kualitas Produk IKM Hasil Pertanian	Mensosialisasikan kepada pelaku IKM untuk menerapkan manajemen standar mutu perusahaan	X	X	X	X	X	X
		Melaksanakan sistem pengawasan terhadap kualitas dan standar mutu produk IKM	X	X	X	X	X	X



Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM yang bersertifikat BNSP	Meningkatkan dan Menyediakan tenaga kerja lokal yang yang memenuhi standar kompetensi global sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja	X	X	X	X	X	X
Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Mendorong keserikatan dan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam Meningkatkan Produktivitas, Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis serta mendorong keserikatan dan Collective Bargaining antara pekerja dan pemberi kerja demi meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja seperti mengurangi perselisihan, pemenuhan UMK dan terpenuhinya Jaminan Sosial Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X



Misi 7	Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani							
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kinerja dan pengelolaan keuangan yang baik di Lingkungan Disnakerind	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara optimal sehingga mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	X	X	X	X	X	X
	Peningkatan Pengendalian Keuangan Secara Optimal	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara optimal sehingga mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	X	X	X	X	X	X

6. Kebijakan Program

Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut, sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian sasaran yang terkait secara keseluruhan.

Sasaran pelayanan bersifat relatif kompleks dan krusial, karena itu penanganannya harus sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Sesuai

dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dinas Daerah, maka rumusan program pada setiap sasaran yang berpengaruh pada pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah :

Tabel 2.7

Rincian Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

MISI 4	MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT CERDAS DAN KOMPETITIF SERTA MENJAWAB KEBUTUHAN DARAH		
	Tujuan	Sasaran	Kebijakan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Guna Menekan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Menyediakan tenaga kerja lokal yang terlatih sesuai standar kompetensi global Sehingga memenuhi kebutuhan pasar kerja	1. Peningkatan dan Kesempatan Perluasan Kerja <



		setengah penganggur	3. Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi.
		Membangun dan menyediakan Sentra IKM serta menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi	
		Melakukan arahan, binaan, dan membuka informasi pengolahan produk perikanan	
		Mensosialisasikan kepada pelaku IKM	



		untuk menerapkan manajemen standar mutu perusahaan	
		Melaksanakan sistem pengawasan terhadap kualitas dan standar mutu Produk IKM	
	Meningaktnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM yang bersertifikat BNSP	Peningaktan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis serta mendorong keserikatan dan Collective Bargaining antara pekerja dan pemberi kerja demi meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja seperti mengurangi perselisihan,	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketanagakerjaan



		pemenuhan UMK dan terpenuhinya Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
--	--	---	--

MISI 7	Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani		
	Tujuan	Sasaran	Program
Mewujudkan Tata Kelolaan Pemerintahan yang Baik Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi		Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan dan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran
			1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan



		berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal serta meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public, sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat	Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Pengembangan Data/Informasi 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
--	--	---	---

B. Rencana Kerja OPD Tahun 2019

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 di atas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten

Karimun menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) 2019.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja (Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact), dan untuk tingkat kegiatan ikhtisar Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 untuk dapat melaksanakan Program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 5.417.960.200,- untuk 10 Program dan 30 kegiatan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2018.

C. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 meliputi 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 10 Program dan 18 Kegiatan jumlah anggaran yang ditetapkan untuk Mencapai Target Indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 3.439.000.000,- sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.		1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,71%



	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,7%
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	3.	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	11%
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	4.	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	15,4%
4.	Meningkatnya kesejahteraan dan Perlindungan bagi tenaga kerja	5.	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	29%
		6.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35%

PROGRAM

ANGGARAN

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.094.000.000,-
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 25.000.000,-
3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 400.000.000,-



4.	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp.	320.000.000,-
5.	Pengembangan Data/Informasi	Rp.	135.000.000,-
6.	Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Rp.	100.000.000,-
7.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	350.000.000,-
8.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	790.000.000,-
9.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	990.800.000,-
10.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	40.000.000,-
TOTAL ANGGARAN		Rp	3.439.000.000,-

.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana disebut dalam SE Menpan 31/2004, adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selaku Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab menjelaskan atau memberikan evaluasi dan analisa capaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran (Tahun Anggaran 2019) sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai mana berikut ini :



Tabel 3.1

Formulir Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,71%	58.09%	95.68%
		2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,7 %	3.29%	88.92%
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	3.	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	11%	7,30%	66.36%
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	4.	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	15,4%	16,92	110%
4.	Meningkatnya kesejahteraan dan Perlindungan bagi tenaga kerja	5.	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar	29%	58,3%	201%



			Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)			
		6.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35%	41,38%	118%

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2019 Menurut Sasaran

Capaian kinerja ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja menurut sasaran Strategis dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun terdapat 5 (lima) sasaran sebagaimana formulir diatas dengan penjelasan sebagai berikut :



Sasaran 1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal
-----------	---

Terjadinya pertumbuhan tenaga kerja lokal merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Karimun. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun, dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran 1 menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran disertai pencapaian sasaran selama 3 (tiga) tahun yakni :

Tabel 3.2

Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran 1

Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal											
No	Indikator	Satu an	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realis asi	Capai an	Target	Realis asi	Capai an	Target	Realis asi	Capai an
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Pers en	60,19	63,23	105	60,45	63,31	105	60,71	58.09	95.68
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	Pers en	3,5	2,07	59,14	3,6	3,7	103	3.7	3.29	88.92
Rata-rata Capaian Sasaran					82,1			104			92.30

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata dari dua indikator sasaran 1 adalah sebesar 92,30 persen. Nilai menunjukkan bahwa hasil capaian



mendekati dari target yang ditentukan atau dikatakan baik. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut : Sebagaimana pada tabel diatas masing- masing indikator dapat kami jelaskan yakni :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja dengan rumus :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100 \%$$

Dari rumus diatas angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karimun pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Penduduk Kabupaten Karimun berumur 15 Tahun keatas

Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2019

Jenis Kegiatan		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)		(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)		84.143	81.749	165.892
Angkatan Kerja		66.917	29.442	96.359
	Bekerja	62.557	28.538	91.095
	Pengangguran Terbuka	4.360	904	5.264
Bukan Angkatan Kerja		17.226	52.307	69.530
	Sekolah	7.420	6.769	14.189
	Mengurus Rumah Tangga	4.421	43.138	47.559
	Lainnya	5.385	2.400	7.782
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)		79.53	36.02	58.09
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)		6.52	3.07	5.46

Sumber ; BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2019

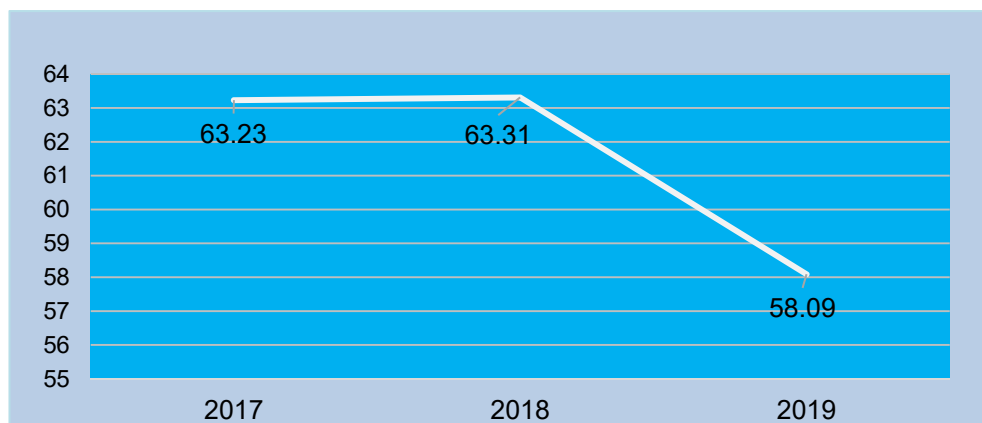
Dari tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Karimun sebesar 96.359 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia kerja sebesar 165.892 jiwa, untuk itu :

$$\text{TPAK} = \frac{96,359}{165,892} \times 100 \% = 58,09 \%$$

Hal ini berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun pada tahun 2019 yakni sebesar 58,09 persen. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berikut perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karimun tahun 2017 – 2019 pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Sumber ; BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2019

Sebagaimana gambar diatas bahwa TPAK pada tahun 2017 sebesar 63,23 persen, terjadi sedikit peningkatan di tahun 2018 sebesar 63.31 persen,



namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar 58.09 persen.

Permasalahan :

1. Secara langsung, naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja di Kabupaten Karimun.
2. Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Karimun yang relatif agak menurun pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Kabupaten Karimun.

Upaya :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sesuai anggaran yang diberikan berupaya melaksanakan pelatihan keahlian sesuai pasar kerja, sehingga calon tenaga kerja bisa ditempatkan sesuai yang dibutuhkan pasar kerja dengan begitu TPAK akan meningkat dan pengangguran akan berkurang.
2. Kesempatan Kerja di Kabupaten Karimun juga harus di usahakan oleh Pemerintah Daerah sehingga perusahaan dapat menyerap tenaga kerja dalam permintaan yang besar, karna semakin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.



2. Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal

Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) diperoleh dengan rumus :

$$\text{P3TKL} = \text{Persentase Penerimaan Tahun ini} - \text{Persentase Penerimaan Tahun Lalu}$$

Untuk mengetahui Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana rumus diatas dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Tahun	Pencari Kerja Yang Terdaftar	Pekerja Yang Ditempatkan	Persentase Penerimaan
1	2	3	4 (3/2x100%)
2018	717	293	37,07%
2019	1.566	529	40,80%

Pada tahun tahun 2018 pendaftar pencari kerja (AK.1) berjumlah 717 Orang dan yang diterima oleh perusahaan berjumlah 293 orang, maka $293/717 \times 100\% = 37,07$, Sementara pada tahun 2019 pendaftar pencari kerja (AK.1) berjumlah 1.566 orang dan yang diterima oleh perusahaan berjumlah 529 orang dengan demikian $529/1.566 \times 100\% = 40,80\%$.

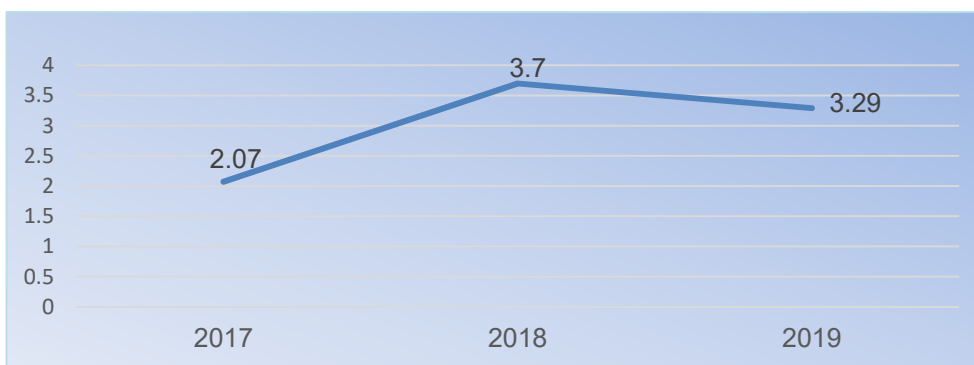
Selanjutnya Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) =

$$40,80\% - 37,07\% = 3,29\%$$

Maka pada Realisasi Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal pada tahun 2019 sebesar 3.29 persen.

Berikut Perkembangan Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) sebagai mana berikut :

Gambar 3.2
Perkembangan Persentase Penerimaan Tenaga Kerja Lokal
Tahun 2017 s.d 2019



Dari Gambar diatas dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2017 P3TKL sebesar 2.07 persen, terjadi peningkatan di tahun 2018 sebesar 3.7 persen, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 3.29 persen

Untuk Penerimaan Pencari Kerja di Kabupaten Karimun dapat kami jelaskan bahwa perekrutan tenaga kerja tidak juga melalui pemda karna pelaksanaan penempatan tenaga kerja juga boleh dilakukan oleh lembaga swasta berbadan hukum, dalam hal ini perusahaan yang merekrut tenaga kerja (Dasar Hukum Permen Transmigrasi RI Nomor : Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja BAB II Pasal 3) : Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan

(2) Lembaga Swasta yang berbadan Hukum.

Dapat kami jelaskan jumlah tenaga kerja lokal yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun pada Tahun 2019 yakni :

Tabel 3.5
Pencari Kerja terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Sekolah Dasar	189	6	195
Sekolah Menengah Pertama	175	7	182
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Kejuruan	858	169	1.027
Diploma I/II/III	17	19	36
Universitas	64	62	126
Jumlah/Total	1.303	263	1.566

Sumber ; Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2019

Dari tabel diatas bahwa Pencari Kerja tertinggi yakni pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan berjumlah 1.027 Orang terdiri dari 858 laki-laki dan 169 perempuan, sementara Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6

Pencari Kerja yang terdaftar

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Bulan	Umur 15-19		Umur 20-44		Umur 45-54		Umur >55		Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	3	4	34	21	1	0	0	0	38	25
Pebruari	4	5	10	9	0	0	0	0	14	14
Maret	4	1	28	9	0	0	0	0	32	10
April	10	1	72	8	1	0	0	0	83	9
Mei	7	3	17	7	2	0	0	0	26	10
Juni	12	7	50	10	3	0	0	0	65	17
Juli	23	17	69	21	2	0	0	0	94	38
Agustus	20	9	82	26	5	0	0	0	107	35
September	14	6	49	16	2	0	0	0	65	22
Oktober	24	6	70	18	7	0	0	0	101	24
Nopember	27	3	195	24	18	0	1	0	241	27
Desember	44	7	366	15	23	0	4	0	437	32
Jumlah	192	69	1042	194	64	0	5	0	1303	263

Sumber ; Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2019

Dari tabel diatas bahwa pencari kerja menurut kelompok umur tertinggi berada pada kelompok umur 20-44 berjumlah 1.236 orang terdiri dari 1.042 laki-laki dan 194 perempuan dan yang terendah pada kelompok umur >55 berjumlah 5 orang yakni hanya berjenis kelamin laki-laki.

Permasalahan :

1. Masih belum stabilnya perekonomian dunia
2. Melesunya permintaan ekspor batu granit ke Luar Negeri.
3. Belum adanya perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja dalam permintaan yang besar
4. Masih adanya beberapa Perusahaan tidak melaporkan jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan.

Upaya :

Sebagai pelayan masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tetap berupaya adanya kedekatan dengan perusahaan sehingga mudah mendapatkan data-data khususnya tenaga kerja yang ditempatkan pada perusahaan sehingga terwujudnya target yang telah ditetapkan.



Sasaran 2

Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja

Pengukuran pencapaian sasaran 2 menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran disertai pencapain sasaran selama 3 (tiga) tahun yakni :

Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja											
No	Indikator	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Targ et	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	4	3,24	81,25	8	6	75	11	7,30	66,36

Untuk mengetahui indikator Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru yakni dengan rumus :

Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru (IKM) tahun ini (dikurangi) jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru (IKM) tahun lalu (dibagi) Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru (IKM) tahun lalu (dikali) 100 persen

Sebagaimana rumus diatas maka Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 Yakni :

Tabel 3.7
Pertumbuhan Wirausaha Baru
(Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah)
Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
		(pelaku usaha)	(pelaku usaha)
1	2	4	5
1	Karimun	174	184
2	Meral/Meral Barat	204	217
3	Tebing	180	186
4	Kundur	151	178
5	Kundur Barat	71	76
6	Kundur Utara	67	71
7	Buru	61	65
8	Moro	102	110
9	Durai	34	38
10	Belat	23	25
11	Ungar	77	84
Jumlah		1150	1234

Sumber ; Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2019

Sebagaimana pada tabel Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) diatas maka penghitungan sesuai dengan rumus yakni :

Jumlah IKM Th 2019 – Jumlah IKM Th 2018

$$\frac{1234 - 1150}{1150} \times 100\% = 7,30\%$$

Jumlah IKM Th 2018

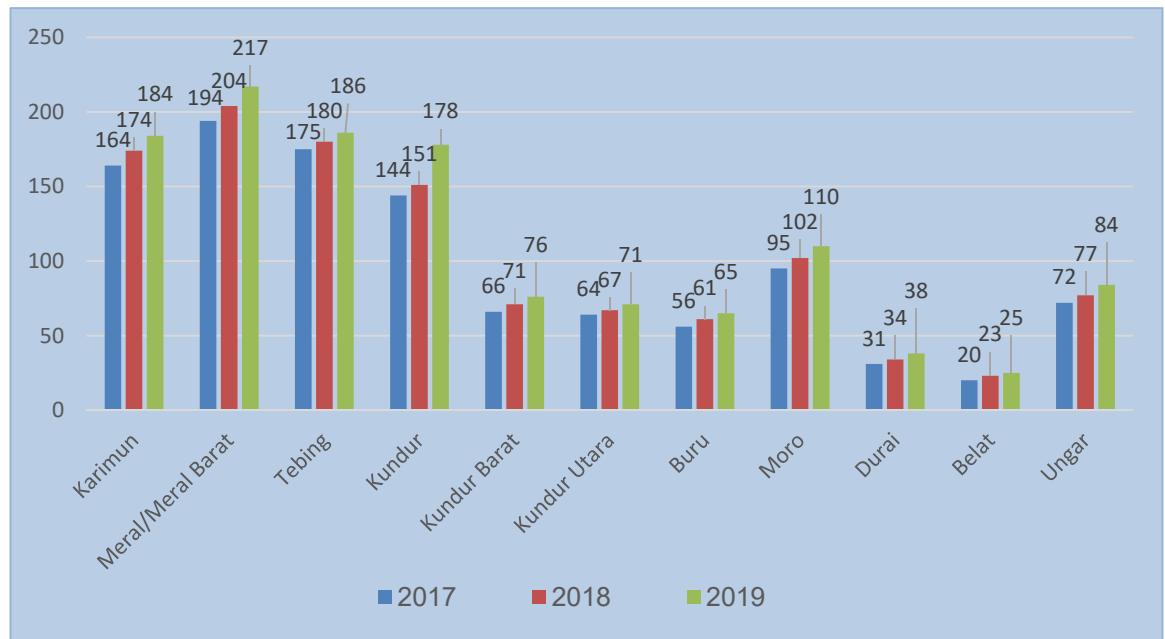
Dari hasil penghitungan diatas maka pada Tahun 2019 Realisasi Indikator Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru untuk Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 7,30 persen.

Sementara perkembangan Pelaku Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2019 yakni :

Gambar 3.3

Perkembangan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Tahun 2017 - 2019



Sumber ; Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019



Dari gambar diatas bahwa jumlah Pelaku Usaha IKM Terbesar pada tahun 2019 yakni pada wilayah Meral/Meral Barat berjumlah 217 Pelaku Usaha IKM, urutan kedua terdapat di wilayah tebing berjumlah 186 Pelaku Usaha IKM, urutan ketiga di wilayah Karimun berjumlah 184 Pelaku Usaha IKM, sementara Pelaku Usaha terkecil terdapat di wialayah belat berjumlah 25 Pelaku Usaha IKM.

Permasalahan :

1. Keterbatasan sarana dan Prasarana produksi di bidang perindustrian terutama pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal.
2. Permasalahan permodalan terutama dialami oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan usaha terutama untuk pemenuhan alat produksi.

Upaya :

1. Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta permodalan sudah diajukan melalui usulan anggaran APBD, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun akan tetap berupaya mengajukan usulan melalui APBN yakni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yakni dengan Sentra Industri Kecil dan Menengah.



Sasaran 3

Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Berkompeten

Pengukuran pencapaian sasaran 3 menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran disertai pencapaian sasaran selama 3 (tiga) tahun yakni :

Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Berkompeten											
No	Indikator	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Persen	14,3	21,5	150,4	14,8	16,1	108	15,4	16,92	110

Untuk mengetahui indikator Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten yakni dengan rumus :

Jumlah Tenaga Kerja (dibagi) jumlah tenaga kerja yang bersertifikat Kompetensi (dikali) 100 persen

Dengan rumus diatas maka Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat

Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Karimun Tahun 2019

Jumlah Tenaga Kerja di Kawasan FTZ	Yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Khusus PT.SAI PEM	Yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja di Luar Kawasan FTZ	Yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Yang bersertifikat kompetensi
2.488 Orang	405 Orang	618 Orang	433 Orang	2.891 Orang	177 Orang	5.997 Orang	1.055 Orang 4.245 Orang

Sumber ; Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019

Sebagaimana tabel diatas maka hasil indikator persentase

Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten yakni :

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\% = \frac{1.015 \text{ Orang}}{5.997 \text{ Orang}} \times 100\% = 16,92\%$$

Hal ini berarti persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten pada tahun 2019 yakni sebesar 16,92 persen.



Permasalahan :

1. Keterbatasan Anggaran pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang bersertifikasi Kompetensi.
2. Sepinya Lapangan Usaha baru di kabupaten Karimun.

Upaya :

1. Dengan Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berupaya untuk memberikan keahlian/skill kepada tenaga kerja dengan mengirimkan calon tenaga kerja ke Balai Besar Pengembangan Keahlian Kerja yang ada di Serang, Medan, Semarang, Bekasi dan Bandung.
2. Setelah mendapatkan Sertifikat BNSP maka tenaga kerja tersebut akan mudah bekerja pada tingkat Internasional dan Nasional, khususnya di Wilayah Kabupaten Karimun yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.



Sasaran 4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja
-----------	--

Pengukuran pencapaian sasaran 4 menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran disertai pencapaian sasaran selama 3 (tiga) tahun yakni :

Tabel 3.9

Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran 4

Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja											
No	Indikator	Satu an	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an
1	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Pers en	25	40	260	25	33	122	29	58,3	201
2	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pers en	34,3	35,4	103	34,7	29,1	83,7	35	41,38	118
	Rata-rata Capaian Sasaran				181.5			102.9			159.5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 capaian rata-rata dari dua indikator sasaran 4 adalah sebesar 159,5 persen. Nilai menunjukkan bahwa

hasil capaian melebihi dari target yang ditentukan atau dikatakan sangat baik.

Adapun penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. **Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI)**

Untuk mendapatkan Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI) dengan rumus :

Jumlah kasus terselesaikan pada tahun ini (dikurang) Jumlah kasus terselesaikan tahun lalu (dibagi) jumlah kasus terselesaikan pada tahun lalu di kali 100 persen

Untuk mengetahui Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI) sebagaimana rumus diatas dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

Kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Tahun 2018 – 2019

Tahun	Kasus Tercatat	Kasus Terselesaikan
2018	18	12
2019	6	5

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pada tahun 2018 jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 12 kasus sementara tahun 2019 jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 5 kasus, untuk itu :

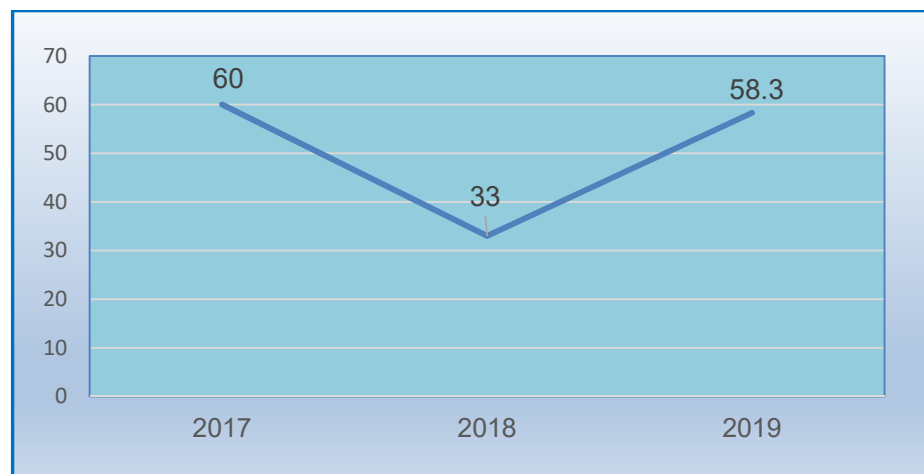
$$\frac{5 - 12 = -7}{12} = \times 100\% = 58,3 \%$$

Hal ini berarti Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI) Kabupaten Karimun pada tahun 2019 yakni sebesar 58,3 persen.

Selanjutnya perkembangan Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI) yakni :

Gambar 3.3

Perkembangan Perentase Penurunan Angka
Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2017 – 2019



Dari Gambar diatas bahwa pada Tahun 2017 Perentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial sebesar 60 persen, di tahun 2018 terjadi penurun sebesar 33 persen, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 58.3 persen.

Permasalahan :



Masih ada perusahaan yang tidak mematuhi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) diantaranya perusahaan tidak konsisten dalam menerapkan Perjanjian Kerja kepada Pekerja.

Upaya :

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian khususnya Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja akan tetap berupaya merangkul perusahaan dan pekerja agar tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan agar kasus dapat diperkecil.

2. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk mendapatkan persentase tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja dengan rumus :

Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif (dibagi)
jumlah pekerja/buruh (dikali) 100 persen

Untuk mengetahui Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana rumus diatas dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2019

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan					
Aktif		Non Aktif		Jumlah	
Pemberi Kerja/Badan Usaha	Tenaga Kerja	Pemberi Kerja/Badan Usaha	Tenaga Kerja	Pemberi Kerja/Badan Usaha	Tenaga Kerja
927	14,732	533	20,867	1,460	35,599

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif berjumlah 14.732 jiwa. Sementara jumlah pekerja/buruh pada tahun 2019 berjumlah 35,599 untuk itu penghitungan sesuai rumus yakni :

$$\begin{array}{c}
 \text{Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif} \\
 \frac{14,732 \text{ jiwa}}{35,599 \text{ jiwa}} \times 100\% = 41,38 \% \\
 \text{Jumlah pekerja/buruh}
 \end{array}$$

Dari hasil rumus diatas maka persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktif Kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebesar 41,38 Persen

Selanjutnya Perkembangan Pekerja/Buruh Kepesertaan BPJS Aktif selama Tahun 2017 – 2019 Kabupaten Karimun sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3.4

Perkembangan Pekerja/Buruh Kepesertaan BPJS Aktif

Tahun 2017 – 2019

*Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019***Permasalahan :**

Masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan kepada para karyawan.

Upaya :

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian khususnya Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja tetap bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pengertian dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan akan keutamaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

C. Realisasi Anggaran

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pengelolaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan Kegiatan, kedudukannya dipandang perlu diketahui secara publik untuk itu dalam rangka menentukan capaian target anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan akan dianalisis kedalam 1 (satu) urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan 1 (satu) urusan pilihan Industri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian %	
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,71%	-	58,09%	-	95,68%	-
		Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,7%	42.621,300	3,29%	42,621,300	88,92%	100%
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	11%	1,060,000,000	7,30%	1,053,719,300	66,36%	99,41%
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Persentase Peningkatan tenaga kerja lokal yang berkompetensi	15,4%	300,000,000	16,92%	299,250,000	110%	99,75%
4	Meningkatnya Kesejahteraan	1. Persentase Penurunan	29%	340,000,000	58,3%	335,532,500	201%	97,84



	dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPIH)						
		2. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35%		41,38%		118%	

D. Capaian Kinerja RPJMD

Capaian Kinerja RPJMD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten

Karimun Tahun 2017 – 2019 yakni :



Tabel 3.13

Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 - 2019

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator kinerja Tujuan/ <i>Impact</i>)	Kondisi Awal	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah											
Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Indeks Pembangunan Manusia	69,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,94	60,19	63,23	105,05	60,45	63,31	104,73	60,71%	58.09%	95.68%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,3	3,5	2,07	59,14	3,6	3,7	102,78	3,7 %	3.29%	88.92%



E. Capaian Kinerja Renstra

Capaian Kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2019 yakni :

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Tahun 2017 - 2019

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator kinerja Tujuan/ <i>Impact</i>)	Kondisi Awal	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah											
Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Indeks Pembangunan Manusia	69,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,94	60,19	63,23	105,05	60,45	63,31	104,73	60,71%	58.09%	95.68%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,3	3,5	2,07	59,14	3,6	3,7	102,78	3,7 %	3.29%	88.92%
Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,23	6,66	5,70	85	6,15	2,45	39,8	5,66	5,46	96,47
Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausahabaru	na	4	3,24	81,25	8	6	75	11	7,30	66.36
Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja lokal yang bersertifikat kompetensi	na	14,3	21,5	150,4	14,8	16,1	114	15,4	16,92	110
Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar PPHI	na	25	40	160	27	33	27	29	58,3	201



	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja	na	34,3	35,4	103	34,7	29,1	83,7	35%	41,38%	118
--	---	----	------	------	-----	------	------	------	-----	--------	-----



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2019 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Laporan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2019 kepada stakeholders, dengan harapan agar dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019 ini, diharapkan adanya kesiapan seluruh jajaran dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk melaksanakan *Good Governance* dengan melibatkan stakeholders sehingga tercipta sasaran dan hasil kerja serta akuntabilitas baik kuantitatif maupun kualitatif yang memuaskan.

Tg. Balai Karimun, Maret 2020

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc
Pembina Utama Muda
NIP.19671003 199203 1 010



LAMPIRAN

1. Rancana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
3. Rencana Aksi Tahun 2019
4. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2019



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	60,71
		2	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	Persen	3,7
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	3	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	11
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten	4.	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten	Persen	15,4
4.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Lokal	5	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	29
		6.	Persentase Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Jaminan Sosisal Tenaga Kerja	Persen	35

Tg. Balai Karimun, Januari 2019

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. HAZMI YULIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610129 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Jend. Sudirman Gedung Gunung Papan Lantai II
TANJUNG BALAI KARIMUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. HAZMI YULIANSYAH, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si
Jabatan : BUPATI KARIMUN
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA,
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI KARIMUN,


DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**


Ir. H. HAZMI YULIANSYAH, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,71%
		2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,7 %
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	3.	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	11%
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	4.	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	15,4%
4.	Meningkatnya kesejahteraan dan Perlindungan bagi tenaga kerja	5.	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	29%
		6.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35%

PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.094.000.000,-
2.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	25.000.000,-
3.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	400.000.000,-
4.	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp.	320.000.000,-
5.	Pengembangan Data dan Informasi	Rp.	135.000.000,-
6.	Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Rp.	100.000.000,-
7.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	350.000.000,-
8.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	990.000.000,-
9.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	120.000.000,-



10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 40.000.000,-

TOTAL ANGGARAN Rp. 3.439.000.000,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2019

BUPATI KARIMUN,

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**


DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si


Ir. H. HAZMI YULIANSYAH, M.Si



RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2019

NO.	PK		Target Per TW		Perhitungan Target Indikator	Program	Kegiatan									
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW		Target Anggaran				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11				
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	I		Jumlah Angkatan Kerja [dibagi] Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100 persen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	I		I				
			II							II						
			III							III						
			IV	60,71%						IV						
		Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	I	1,4%	Jumlah Tenaga kerja Lokal yang diterima perusahaan [dibagi] Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang mendaftar (dikali) 100 persen	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	1. Operasional Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I	15,000,000			
			II	2,3%						II	25,000,000					
			III	3,2%						III	35,000,000					
			IV	3,7%						IV	1 Dokumen	IV	50,000,000			
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	I	3%	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru yang tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya [dibagi] Jumlah Pertumbuhan Wirausahabaru pada tahun sebelumnya dikali 100 persen	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah Peserta	Orang	I		I				
			II	5%						II	85 Orang	II	440,000,000			
			III	8%						III						
			IV	11%						IV						
										2. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Calon Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jumlah Peserta	Orang	I		I	
													II		II	
													III	85 Orang	III	150,000,000
													IV		IV	
							3. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Peserta	Orang	I		I				
										II		II				
										III	25 Orang	III	150,000,000			
										IV		IV				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

							4. Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I	15,000,000					
										II		II	55,000,000					
										III		III	115,000,000					
										IV	1 Dokumen	IV	150,000,000					
							5. Penyusunan RPIK	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I						
										II		II						
										III		III						
										IV	1 Dokumen	IV	100,000,000					
						Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim	Jumlah Peserta	Orang	I		I						
										II	6 Orang	II	170,000,000					
										III		III						
										IV		IV						
							2. Pelatihan Pembuatan Mesin Penggiling dan Penyaring Kedelai	Jumlah Peserta	Orang	I	15 Orang	I	150,000,000					
										II		II						
										III		III						
										IV		IV						
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Persentase Peningkatan tenaga kerja lokal yang berkompetensi	I	4,7%	Jumlah Tenaga Kerja (dibagi) jumlah tenaga kerja lokal yang bersertifikat BNSP (dikali) 100 persen	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja	Jumlah Peserta	Orang	I		I	5,000,000					
			II	8,9%						II	50 Orang	II	100,000,000					
			III	12,7%						III	75 Orang	III	150,000,000					
			IV	15,4%						IV	100 Orang	IV	200,000,000					
										2. Pelatihan dan Sertifikasi Las Lanjutan	Jumlah Peserta	Orang	I		I			
													II	11 Orang	II	200,000,000		
													III		III			
													IV		IV			
			4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja			Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	I	8%	Selisih jumlah kasus hubungan industrial tahun ini dikurangi dengan selisih jumlah kasus pada tahun lalu (dibagi) jumlah kasus pada tahun sekarang (dikali) 100 persen	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun	Terbitnya Angka UMK	UMK	I		I	3,500,000
								II	17%						II		II	65,000,000
								III	22%						III		III	105,000,000
								IV	29%						IV	100%	IV	192,110,000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	I	9%	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (dibagi) Jumlah tenaga kerja (dikali) 100 persen		2. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Persentase Pembinaan LKS Tripartit	LKS Tripartit	I		I	35,000,000
			II	16%						II		II	65,000,000
			III	27%						III		III	95,000,000
			IV	35%						IV	LKS Tripartit	IV	138,140,000
							3. Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah SP/SB yang dibina	SP/SB	I		I	
										II		II	
										III	15 SP/SB	III	19,750,000
										IV		IV	
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen	Dokumen	I	1 Dokumen	I	25,000,000
										II		II	
										III		III	
										IV		IV	
						Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	1. Pelaporan dan Sinkronisasi data Tenaga Kerja bagi TKI dan TKA di Wilayah Kab Karimun	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I	1,500,000
										II		II	2,500,000
										III		III	35,000,000
										IV	1 Dokumen	IV	50,000,000
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis	Jenis	I		I	280,000,000
										II		II	550,000,000
										III		III	850,000,000
										IV	21 Jenis	IV	1,094,000,000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I		
									II		II		
									III	1 Dokumen	III	25,000,000	
									IV		IV		
						2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	I	1 Dokumen	I		25,000,000
									II		II		35,000,000
									III		III		45,000,000
									IV	2 Dokumen	IV		65,000,000



						3. Evaluasi Renstra OPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I		
									II		II		
									III	1 Dokumen	III	30,000,000	
									IV		IV		
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	Unit	I	6 Unit	I	40,000,000
										II		II	
										III		III	
										IV		IV	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

Ir. HAZMI YULIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610129 198903 1 001



REALISASI RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2019

NO.	PK		Target	Realisasi Per TW	Perhitungan Target Indikator	Penjasan Analisis dan Evaluasi	Program	Kegiatan										Analisis Keuangan terhadap Capaian Kinerja	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW					Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW			Realisasi Per TW	Target Anggaran				Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12			13	14			15	16
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	I.	I.	Jumlah Angkatan Kerja (dibagi) Jumlah Penduduk Usia Kerja (dikali) 100 persen	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator, maka jumlah Angkatan Kerja berjumlah 96.359 jiwa sedangkan jumlah Penduduk Usia Kerja berjumlah 165,892 Jiwa (sumber data BPS Kab Karimun tahun 2019) Dengan demikian Realisasi Triwulan IV sebesar 58,09%, dengan capaian sebesar 95,68%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				I	-	I	-	I	-	I	-	Anggaran Minim
			II.	II.							II	-	II	-	II	-			
			III.	III.							III	-	III	-	III	-			
			IV.	IV.							IV	-	IV	-	IV	-			
		Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	I. 1,4 %	I. 0,3 %	Persentase Penerimaan tahun ini (dikurangi) Persentase Penerimaan tahun lalu	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator, maka persentase penerimaan tahun ini sebesar 40,80% sedangkan persentase penerimaan tahun lalu sebesar 37,07% Dengan demikian Realisasi Triwulan IV sebesar 3,29%, dengan capaian 88,92%	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	1. Operasional Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I		I	15,000,000	I	15,995,500	Dari hasil evaluasi Triwulan IV, terjadi rasionalisasi anggaran pada Pemda menjadi 25,313,000. dan Realisasi Anggaran sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk mendapatkan data-data pencari kerja yang mendaftar yang diterima oleh perusahaan-perusahaan se-Kabupaten Karimun
			II.2,3%	II.1,7%							II		II		II	21,545,500			
			III.3,2%	III.2,2%							III		III		III	25,313,000			
			IV 3,7%	IV.3,29%							IV	1 Dokumen	IV	1 Dokumen	IV	25,313,000			
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	I. 3%	I. 1,7%	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru yang tahun ini (dikurangi) Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru tahun lalu [dibagi] Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru tahun lalu (dikali) 100 persen	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator, Pertumbuhan Wirausaha Baru pada tahun ini berjumlah 1209 IKM (dikurangi) Jumlah Wirausaha Baru tahun lalu berjumlah 1150 IKM maka berjumlah 59 IKM (dibagi) Jumlah IKM Tahun lalu 1150 IKM (dikali) 100 persen, untuk itu realisasinya sebesar 5,13%, sementara	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV, Realisasi Anggaran sebesar 79,55% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk memberikan bantuan Mesin Jahit agar para peserta bisa berwirausaha		
			II. 5%	II.2,3%							II	85 Orang	II	85 Orang	II	318,202,000			
			III.8%	III.3,8%							III		III		III				
			IV.11%	IV.5,13%							IV		IV		IV				

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019



						capaiannya sebesar 41,81%		2. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Calon Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I		I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV, Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk mendapatkan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas PTSP
											II		II		II		II		
											III	85 Orang	III	85 Orang	III	150,000,000	III	149,995,500	
											IV		IV		IV		IV		
								3. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I		I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV, Realisasi Anggaran sebesar 0 dikarenakan Rasionalisasi Anggaran pada Pemerintah Daerah kabupaten Karimun
											II		II		II		II		
											III	25 Orang	III	25 Orang	III	150,000,000	III	0	
											IV		IV		IV		IV		
								4. Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I		I	15,000,000	I	7,751,000	Dari hasil evaluasi Triwulan IV, Realisasi Anggaran sebesar 99.87% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk mendapatkan data-data pertumbuhan IKM se Kabupaten Karimun
											II		II		II	55,000,000	II	49,770,000	
											III		III		III	115,000,000	III	116,332,000	
											IV	1 Dokumen	IV	1 Dokumen	IV	150,000,000	IV	149,801,000	
								5. Penyusunan RPIK	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I		I		I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV, terjadi penambahan pagu menjadi 121,712,500 Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
											II		II		II		II		
											III		III		III		III		
											IV	1 Dokumen	IV	1 Dokumen	IV	100,000,000	IV	121,712,500	
								Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I		I	Dari hasil evaluasi Triwulan IV, Realisasi Anggaran sebesar 99,55% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk pembuatan alat yang berbahan dasar dari laut yakni pembuatan alat produksi kerupuk
											II	6 Orang	II	6 Orang	II	170,000,000	II	169,236,900	
											III		III		III		III		
											IV		IV		IV		IV		



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

							2. Pelatihan Pembuatan Mesin Penggilin g dan Penyarin g Kedelai	Jumlah Peserta	Orang	I	15 Orang	I	15 Orang	I	150,000,000	I	144,771,400	Dari hasil evaluasi Triwulan IV, Realisasi Anggaran sebesar 96,51% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk pembuatan alat produksi pengolahan kedelai menjadi tahu dan air tahu
										II		II		II				
										III		III		III				
										IV		IV		IV				
3	Meningkatkan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Persentase Peningkatan tenaga kerja lokal yang berkompetensi	I. 4,7%	I. 5,4%	Jumlah Tenaga Kerja (dibagi) jumlah tenaga kerja lokal yang bersertifikat Kompetensi (dikali) 100 persen	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator yakni jumlah tenaga kerja sebanyak 5.997 orang (dibagi) jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.015 orang (dibagi) 100 persen hasilnya atau realisasinya sebesar 16,92 persen, dengan capaian sebesar 110 persen	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja	Jumlah Peserta	Orang	I		I		5,000,000	I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV, bahwa telah terjadi rasionalisasi anggaran, menjadi 100.000.000,- maka Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 90% dimana dipergunakan untuk memberikan pelatihan yang bersertifikasi kompetensi
			II. 8,9%	II. 10,8%						II	50 Orang	II	45 Orang	II	100,000,000	II	25,036,000	
			III. 12,7%	III. 13,2%						III	75 Orang	III	65 Orang	III	150,000,000	III	66,886,300	
			IV. 15,4%	IV. 16,92%						IV	100 Orang	IV	90 Orang	IV	200,000,000	IV	99,997,500	
							2. Pelatihan dan Sertifikasi Las Lanjutan	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I				Dari hasil evaluasi Triwulan IV, maka Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk memberikan pelatihan yang bersertifikasi kompetensi
										II	11 Orang	II	11 Orang	II	200,000,000	II	199,252,500	
										III		III		III				
										IV		IV		IV				
4	Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	I. 8%	I. 12,9%	Selisih jumlah kasus hubungan industrial tahun ini (dikurangi) dengan selisih jumlah kasus pada tahun lalu (dibagi) jumlah kasus pada tahun sekarang (dikali) 100 persen	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator yang mana selisih jumlah kasus HI tahun ini sebanyak 5 kasus (dikurangi) selisih jumlah kasus tahun lalu sebanyak 12 Kasus dengan hasil kasus sebanyak 7 kasus (dibagi) jumlah kasus pada tahun sekarang yakni 12 kasus (dibagi) 100 persen maka hasil realisasinya sebesar 58,3% dengan capaian 201%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun	Terbitnya Angka UMK	UMK	I		I		3,500,000	I	0	Dari hasil evaluasi Triwulan IV, bahwa telah terjadi rasionalisasi anggaran, menjadi 187,110,000,- maka Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk mendapatkan angka Upah Minimum Kabupaten
			II. 17%	II. 33,9%						II		II		II	65,000,000	II	45,950,000	
			III. 22%	III. 42,70%						III		III		III	105,000,000	III	49,478,500	
			IV. 29%	IV. 58,3%						IV	Angka UMK	IV	Angka UMK	IV	192,110,000	IV	183,543,000	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	I. 9%	I. 12,9%	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif [dibagi] Jumlah tenaga kerja (dikali) 100 persen	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator yakni jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif sebanyak 14,732 orang (dibagi) jumlah tenaga kerja sebanyak 13,599 orang (dikali) 100 persen maka hasilnya atau realisasinya sebesar 41,38 persen sementara capaiannya sebesar 118 persen. (Sumber Data : BPJS Ketenagakerjaan Kab. Karimun Tahun 2019)		2. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Persentase Pembinaan LKS Tripartit	LKS Tripartit	I		I		I	35,000,000	I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV, bahwa telah terjadi rasionalisasi anggaran, menjadi 133,140,000,- maka Realisasi Anggaran sebesar 99.32% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk pertemuan antara Pemda serta pihak-pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap perusahaan perusahaan se-Kabupaten Karimun
	II. 16%	II. 21,6%							II		II		II	65,000,000	II	36,391,500	
	III. 27%	III. 32,7%							III		III		III	95,000,000	III	36,391,500	
	IV. 35%	IV. 41,38%							IV	LKS Tripartit	IV	LKS Tripartit	IV	138,140,000	IV	132,239,500	
						3. Pembinaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Jumlah SP/SB yang dibina	SP/SB	I		I		I		I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV, maka Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk pertemuan antara Pemda dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh se-kabupaten Karimun memberikan saran dan masukan kepada Para Buruh
									II		II		II		II		
									III	15 SP/SB	III	15 SP/SB	III	19,750,000	III	19,750,000	
									IV		IV		IV		IV		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen	Dokumen	I	1 Dokumen	I	1 Dokumen	I	25,000,000	I	22,824,000	Dari hasil evaluasi Triwulan IV, maka Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
									II		II		II		II		
									III		III		III		III		
									IV		IV		IV		IV		
	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja					1. Pelaporan dan Sinkronisasi data Tenaga Kerja bagi TKI dan TKA di Wilayah Kab Karimun	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I		I	1,500,000	I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV, bahwa telah terjadi rasionalisasi anggaran, menjadi 17,308,300 - maka Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk mendapatkan angka Upah Minimum Kabupaten
									II		II		II	2,500,000	II	4,000,000	
									III		III		III	35,000,000	III	7,403,300	
									IV	1 Dokumen	IV	1 Dokumen	IV	50,000,000	IV	17,308,300	

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019



							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penguasaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	Unit	I	6 Unit	I	6 Unit	I	40,000,000	I	39,886,100	Dari hasil evaluasi Triwulan IV, bahwa telah terjadi rasionalisasi anggaran, menjadi 39,886,100,- maka Realisasi Anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk peningkatan kinerja pegawai
--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------------	------	---	--------	---	--------	---	------------	---	------------	--

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671003 199203 1 010